BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak berperan penting sebagai sumber penerimaan negara di Indonesia. Penerimaan pajak tahun 2013 sebesar Rp.1.148,356 triliun atau sekitar 76,46% dari penerimaan APBN (Fuad Rahmani, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak menjadi tumpuan negara dalam menjalankan roda pemerintah. Oleh karenanya dibutuhkan pengelolaan yang akurat dan tepat terhadap penerimaan pajak. Berikut ini data perbandingan penerimaan pajak terhadap pendapatan APBN selama tahun 2008-2013.

Tabel 1.1
Perbandingan Penerimaan Pajak Terhadap Pendapatan APBN

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Pendapatan Negara	981.609	848.763	992.392	1.086.069	1.334.476	1. 497.521
Penerimaan Pajak	658.700	619.922	743.325	873.735	1.011.735	1.148.365
Presentase	67,10%	73,04%	74,90%	80,45%	75,25%	76,46%

Sumber : Kementerian Keuangan, Tahun 2013.

Berdasarkan data dalam tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak dalam APBN sejak tahun anggaran 2008-2013 rata-rata diatas 60% bahkan ditahun 2011 mencapai 80,45%. Terbukti bahwa penerimaan pajak memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi pembiayaan pembangunan nasional.

Menurut Direktur Jenderal Pajak, Sigit Priadi Pramudito kepatuhan Wajib Pajak masih sangat rendah. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya Wajib Pajak yang dengan sengaja lalai membayar pajak dengan alasan merugi. Diperkirakan jumlahnya mencapai hampir 4.000 perusahaan (Tempo, 2015). Tingkat kepatuhan yang rendah ini juga ditunjukkan dengan data Wajib Pajak yang totalnya mencapai 24 juta hanya sekitar 17 juta saja yang menyampaikan SPT (Detik, 2014).

Kepatuhan Wajib Pajak menjadi masalah yang sangat kompleks (Manurung, 2013). Feld dan Frey (2007) menyatakan, bahwa faktor yang menyebabkan masyarakat kurang tertarik membayar pajak adalah dikarenakan tidak adanya insentif langsung dari negara. Pajak yang telah dibayar juga tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan masyarakat. Masyarakat akan membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya apabila mereka merasakan pelayanan publik sebanding dengan pembayaran pajaknya, adanya perlakuan yang adil dari pemerintah serta proses hukum yang jelas dari pemerintah

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastuktur yang tidak merata dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat tinggi. Masyarakat

kurang merasakan manfaat pajak yang telah dibayar, misalnya masih banyak jalan yang rusak (Manurung, 2013).

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, salah satunya dengan optimalisasi teknologi informasi seperti pengintegrasian sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui program reformasi administrasi pajak Indonesia (Tempo, 2012). Bentuk sistem penerapan administrasi modern (reformasi) salah satunya dengan menggunakan fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi yang dikenal sebagai *e-system* perpajakan.

Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak telah mendorong pemerintah dalam hal ini Ditjen Pajak untuk bersepakat dengan *International Monetary Fund* (IMF) pada tahun 2001 dalam memperbarui program kebijakan ekonomi dan keuangan salah satunya perbaikan administrasti perpajakan. Ada beberapa tahap dilakukannya reformasi pajak, yaitu tahap pertama antara tahun 2002-2009, dimana DJP melakukan perubahan periode tahun 2002 dalam rekstrukturisasi organisasi, perbaikan proses bisnis dan penyempurnaan sistem sumber daya manusia. Sedangkan periode berikutnya tahun 2007 dilakukan reformasi kebijakan dalam amandemen atas beberapa Undang-Undang Perpajakan dan pemberian stimulus fiskal. Pada tahap kedua yaitu tahun 2009-2012, Ditjen Pajak mefokuskan pada pengembangan sumber daya manusia dan pengunaan teknologi informasi dalam admnistrasi perpajakan yang berbasis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-filling*, *e-registration*. Dengan kata lain modernisasi berorientasi pada pelayanan kepada wajib pajak . Moderninsasi admnistrasi perpajakan berbasis *e-system* ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, meningkatkan

kepercayaan terhadap administrasi perpajakan, serta meningkat produktivitas karyawan (Pandiangan, 2008).

Fenomena rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia telah mendorong DJP untuk melakukan reformasi pajak. Salah satunya dengan meningkatkan pelayanan fiskus kepada Wajib Pajak melalui penerapan *e-system* yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang selanjutnya akan dituangkan sebagai bahan penulisan skripsi dengan judul "Pengaruh Efektivitas Penerapan *e-System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak : Survei Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar Pada KPP Pratama "X" Bandung."

Beberapa hasil penelitian sebelumnya mengenai penerapan *e-System* yang mendukung dilakukannya penelitian ini antara lain :

Tabel 1.2

Penelitian Sebelumnya

No	Nama Penulis (Tahun)	Jurnal	Judul	Hasil/Kesimpulan
1.	Qurrotul Aini (2013)	Jurnal Akuntansi UNESA Vol 2, No. 1, 2013 Tersedia : http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/6733/baca-artikel	Peran Sosialisasi *e-Registration* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Kasus Di Kpp Pratama Surabaya Wonocolo	Sosialisasi *e-Registration* berdampak terhadap kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak.
2.	Kadek Putri Handayani –Ni Luh Supadmi (2013)	Jurnal Akuntansi Vol.1, No. 4, Juli 2013 Tersedia : http://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/5875	Pengaruh Efektivitas *e*-SPT Masa PPN Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Denpasar Barat	Efektivitas penerapan *e*-SPT Masa PPN berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Denpasar Barat.
3.	Ita Salsalina Lingga	Jurnal Akuntansi Vol.4 No.1 Mei 2012 Tersedia : http://majour.maranatha.edu/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/948/pdf	Pengaruh Penerapan *e*-SPT PPN Terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak: Survei Terhadap Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama "X"	Penerapan *e*-SPT memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi pengisian SPT.

4	Nita Rysaka, dkk (2014)	Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No.3, 2014 Tersedia : http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/401	Penerapan Sistem Elektronik Dalam Pelayanan Perpajakan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)	Pelaksanaan sistem elektronik perpajakan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara tiap tahunnya mengalami peningkatan dalam penggunaan *e*-SPT dan *e-Filling*

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskna masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana penerapan *e-System* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama "X" Bandung ?
2. Apakah efektivitas penerapan *e-System* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama "X" Bandung?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui efektivitas penerapan *e-System* pada KPP Pratama "X" Bandung.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh dari penerapan *e-System* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama "X" Bandung.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan antara lain :

1. Manfaat Teoritis

   Menambah pengetahuan dan evaluasi atas penerapan *e-System* perpajakan dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebagai salah satu tujuan dari modernisasi administrasi perpajakan. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, khususnya melalui penerapan *e-System* yang efektif.